

1. Judul Program: Program 1-4

Pengelolaan Budi Daya Air

2. Lokasi

Lokasi Program : Keseluruhan DAS Musi (59.932 km²)

Saat ini, konflik antara pemilik kolam ikan dan irigasi hanya terjadi di Kabupaten Musi Rawas. Tabel berikut menunjukkan keberadaan daerah budidaya air di persawahan padi:

Luas Budidaya perairan/kolam ikan (ha)				
OKU	OKI	Muara Enim	Lahat	MURA
3,550	164	409	1,552	703
MUBA	Palembang	Pagaralam	Prabumulih	Rejang Lebong
275	29	169	12	545

3. Tujuan

Budidaya air di persawahan mengalami pertentangan yang runcing dengan penggunaan air irigasi. Air irigasi tidak sampai ke daerah hilir dari sistem irigasi sebagai akibat dari budidaya air. Di sisi lain berdasarkan budidaya air, kuantitas dan kualitas dari air tidak stabil akibat adanya irigasi.

Budidaya air dan irigasi sama-sama penting dari sudut pandang air yang dibutuhkan dan aspek ekonominya. Penggunaan air untuk kedua aktivitas tersebut akan digiatkan pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, metode untuk menyelesaikan pertentangan ini adalah dengan melakukan pendekatan dari bawah (bottom-up)

Untuk menyelesaikan pertentangan ini, daerah untuk budidaya air dan irigasi sebaiknya dipisahkan, melalui pintu operasi dan kondisi lahan, dsb. Jika penggunaan lahan tidak dapat dikontrol, daerah irigasi sebaiknya disatukan melalui realokasi atau mengubah lahan pertanian. Implementasi dari program tersebut akan diselenggarakan oleh masing-masing kota/kabupaten.

Tujuan dari program adalah :

- Membangun metode penyelesaian permasalahan antara budidaya air dan irigasi
- Untuk merealisasikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan

4. Pengelola

- Dinas PU Pengairan Propinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Bengkulu.
- Dinas Terkait: Pemerintah Kabupaten/Kota di DAS

5. Deskripsi Program

Dengan tujuan untuk merealisasikan tujuan program tersebut, aktivitas utama adalah :

Program 1-4-1: Mempelajari Metode Pemecahan Masalah

- Mengadakan konsultasi masyarakat
- Investigasi situasi konflik, termasuk di dalamnya latar belakang dan sejarah, lokasi, jumlah kasus, sistem kepemilikan tanah, dan sebagainya.
- Survei metode realokasi atau pergantian lahan, terdiri dari (mungkin menyerupai metode yang diadopsi untuk konsolidasi lahan) :
 - Penyelidikan intensive terhadap realokasi atau pengubahan fungsi lahan
 - Pemetaan kadaster
 - Penilaian lahan
 - Penetapan harga lahan
 - Metode likuidasi
 - Pendaftaran lahan yang direalokasi atau diubah fungsinya dan pertukaran lahan

Program 1-4-2: Metode Penyebaran

- Penyebaran metode ke kota/kabupaten

6. Jadwal Pelaksanaan

Periode pelaksanaan adalah 2 tahun :

Program		Tahun I				Tahun II				Tahun III				Tahun IV				Tahun V				Tahun VI-X
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1-4	Pengelolaan Budidaya Air																					
1-4-1	Penelitian Metode Solusi	■	■	■	■																	
1-4-2	Penyebaran Metode							■	■													

7. Biaya Program

PC: 100 (orang.hari) x 150.000 (Rp./orang.hari) = Rp. 15 juta

Penyelidikan dan penyebaran : 3 (orang) x 24 (bulan) x 5 (hari/bulan) x 150.000 (Rp./orang.hari) = Rp. 54 juta

Administrasi (5%): Rp. 3,5 juta

Total: Rp. 72,5 juta

8. Lainnya

1. Judul Program : Program 1-6

Pemodelan Pengelolaan Penggunaan Air

2. Lokasi

Lokasi Program : Keseluruhan DAS Musi (59.932 km²)

3. Tujuan

Indonesia menghadapi 5 permasalahan utama, dan salah satunya adalah lambatnya proses pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi bertujuan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kepada tingkat yang layak dan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Propenas 2000-2004 menuntut bahwa tujuan ini dapat direalisasikan hanya jika pengelolaan sumberdaya alam dapat menjamin terpeliharanya daya dukung lingkungan dan konservasi sumberdaya alam.

Dengan tujuan untuk mencapai dan merealisasikan pengelolaan air berkelanjutan, penggunaan air secara seimbang dan adil, dan konservasi dari lingkungan hidup di DAS Musi, model pengelolaan air harus dibangun. Pada model tersebut, partisipasi manusia diperlukan agar model tersebut dapat dipergunakan secara berkelanjutan. Tujuan dari program ini adalah :

- Mempromosikan mekanisme pengelolaan air berkelanjutan di DAS Musi
- Mempromosikan penggunaan air secara adil dan seimbang di DAS Musi
- Meningkatkan konservasi lingkungan hidup di DAS Musi

4. Pelaksana

- DJSDA Kimpraswil, dan Dinas PU Pengairan Propinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Pemerintahan Propinsi Jambi, Bengkulu dan Lampung.
- Dinas Terkait: Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra Selatan, BMG dan UPTD

5. Deskripsi Program

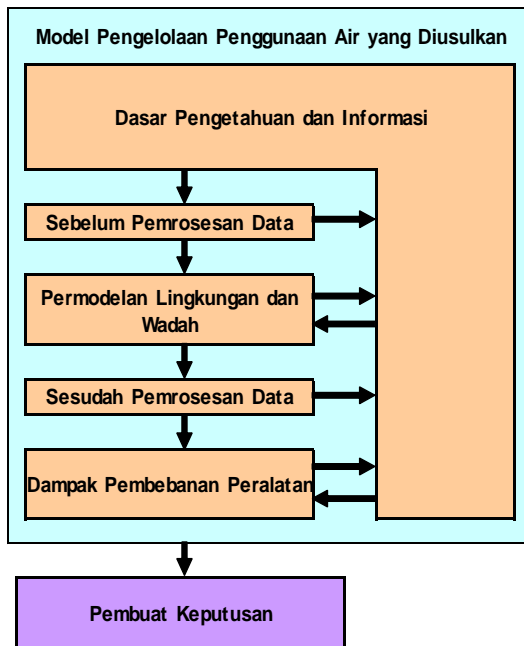
Sub Program 1-6-1: Pembangunan Berbasis Informasi dan Pengetahuan

(1) Meninjau ulang program yang berhubungan (2) Identifikasi model yang dibutuhkan sekarang dan data yang tersedia (3) Penentuan struktur database komputer dan jaringan komunikasi (4) Penentuan akses database (5) Persiapan (6) Pembangunan berbasis informasi dan pengetahuan; dan (7) Pelaksanaan konsultasi publik.

Sub Program 1-6-2: Pembangunan Model DAS

(1) Peninjauan hidrologi (2) Peninjauan sejarah pengembangan sumber daya air dan penggunaan air (3) Peninjauan model-model yang tersedia (4) Merencanakan struktur model (5) Persiapan situasi kondisi (6) Pengembangan model (7) Melaksanakan lokakarya.

5. Deskripsi Program (lanjutan)



Sub Program 1-6-3: Pemodelan dan Analisis Lingkungan Hidup

- (1) Identifikasi data yang dibutuhkan
- (2) Perangkat analisis dampak
- (3) Penilaian lingkungan hidup
- (4) Skenario model dan evaluasi
- (5) Pelaksanaan lokakarya

6. Jadwal Pelaksanaan

Periode Pelaksanaan adalah 2 tahun :

No.	Program Judul	Tahun I				Tahun II				Tahun III				Tahun IV				Tahun V				Tahun VI-X	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1-6	Permodelan Pengelolaan Penggunaan Air																						
1-6-1	Pengembangan Dasar Informasi dan Pengetahuan	■	■	■	■																		
1-6-2	Pengembangan Permodelan Wadah		■	■	■	■	■	■	■														
1-6-3	Pemodelan dan Analisis Lingkungan					■	■	■	■														

7. Biaya Program

Rekayasa 60 (MM) x 200 (Rp. Juta/MM) = Rp. 12.000 juta
 Hardware, Software, dan Lokakarya Rp 900 juta
 Administrasi (5%): Rp. 645 juta
 Total Rp 13.545 juta

8. Lain-lain

1. Judul Program : Program 2-1

Program Penggunaan dan Zonasi Lahan

2. Lokasi

Lokasi subjek terutama di daerah rawa dan Daerah persawahan padi pasang surut di hilir DAS Musi



3. Tujuan

Dataran banjir diperlukan untuk sumber daya air karena dapat mengontrol banjir dan erosi, membantu menjaga kualitas air, dan kontribusi persediaan berkelanjutan air tanah.

Tujuan dari program ini adalah :

- Memelihara rejim sungai yang ada dan untuk mengelola kondisi sungai
- Memelihara fungsi perlambatan air di dataran banjir (untuk penggunaan air, pelunakan banjir, konservasi lingkungan hidup, dsb.)
- Pemeliharaan daerah rawa dan persawahan padi pasang surut
- Mempertahankan aktivitas pembangunan yang berjalan dengan sangat baik dengan memetakan daerah pengendalian

4. Pelaksana

- Kantor Dinas PU Pengairan, Sumatera Selatan

5. Deskripsi Program

Hukum dan peraturan yang ada mengendalikan aktivitas di daerah dataran banjir, oleh sebab itu dibutuhkan pemetaan terbaru di daerah DAS Musi. Program ini membuka pemetaan terhadap daerah dataran banjir.

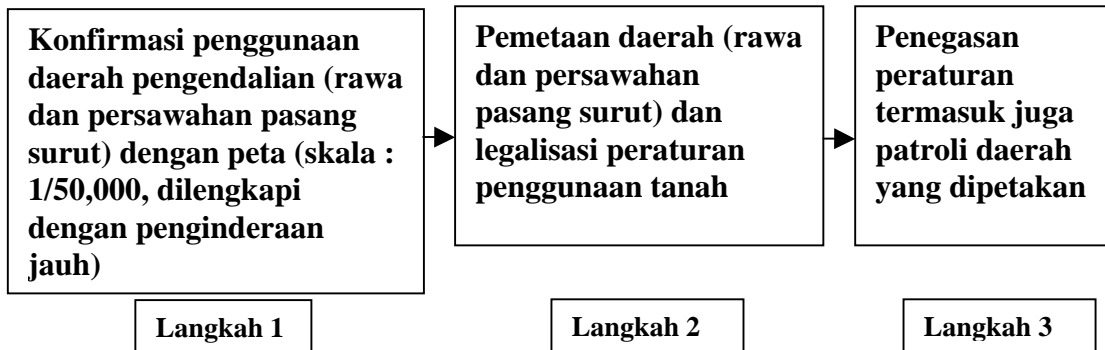
Program tersebut terdiri dari aktivitas berikut :

- Konfirmasi penggunaan daerah pengendalian (rawa dan persawahan padi pasang surut) dengan mempergunakan peta (skala 1/50.000, dibuat dengan penginderaan jauh)
- Pemetaan daerah (rawa dan persawahan pasang surut)

5. Deskripsi Program (lanjutan)

- Legalisasi peraturan penggunaan lahan
- Menegaskan peraturan termasuk patroli terhadap daerah yang dipetakan

Langkah-langkah dalam program tersebut adalah :



Setelah pemantapan lokasi, zonasi wilayah akan dilakukan dalam konteks perencanaan tata ruang Kabupaten dan Kotamadya yang terkait. Sosialisasi perencanaan tata ruang dan penjelasan kepada umum bagi keperluan dan kepentingan pengelolaan dataran banjir sangat penting. Kemudian, pengendalian tata guna lahan akan dilaksanakan. Dataran banjir secara dasar dipelihara untuk penggunaan saat ini dari irigasi bukan pasang surut, rawa, dll., demikian daerah akan lebih baik tergabung dalam produksi beras propinsi menunjuk daerah untuk pemeliharaan secara berkesinambungan.

6. Implementasi Jadwal

Implementasi jadwal sebagai berikut :

Program/Prioritas		Tahun I				Tahun II				Tahun III				Tahun IV				Tahun V				Tahun VI				Tahun VII			
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Komponen 2 : Pengelolaan Dataran Banjir																													
2 - 1	Program pembagian wilayah dan pengawasan tata guna lahan	Persiapan								Kegiatan Penuh																			
2-1-1	Pengkonfirmasi area pengawasan tata guna lahan	██████████								██████████																			
2-1-2	Pembagian wilayah area									██████████																			
2-1-3	Pelaksanaan																	██████████ →											

7. Biaya Program

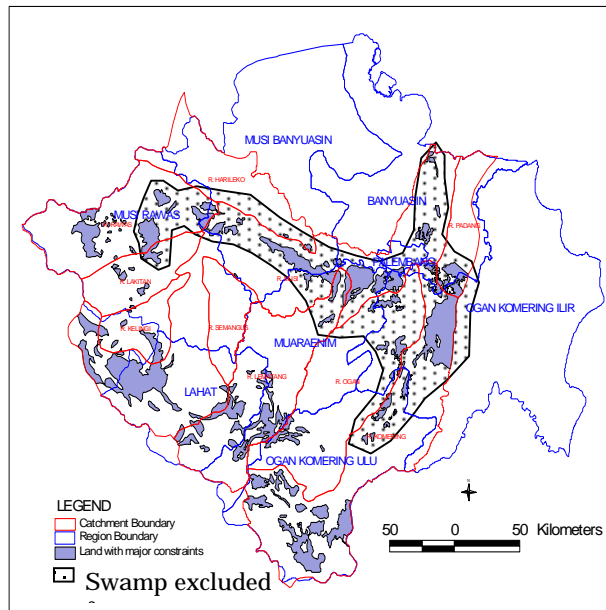
1. Biaya Langsung	
Konfirmasi daerah pengendalian	Rp. 71.000.000
Pemetaan daerah	Rp. -
2. Biaya Tidak Langsung	
Kontingensi Fisik	Rp. 7.000.000
3. Total	Rp. 78.000.000

8. Lain-lain

1. Nama Program: Program 3-1
Penerapan Hutan Pertanaman di Perkebunan Petani

2. Lokasi

Lokasi yang dipilih adalah lahan dengan faktor pembatas utama untuk pertanian yang diperlihatkan pada daerah biru di peta.



3. Tujuan

- Untuk mengurangi erosi tanah di daerah perkebunan petani
- Menggalakkan para petani untuk memperkenalkan metode hutan industri untuk digunakan sebagian besar sebagai rumah kebun
- Godaan bagi para petani untuk penebangan pohon (Perkebunan karet dan kopi).
- Pendidikan bagi para petani di bidang teknis konservasi tanah

4. Pihak Pelaksana

- Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten dan kecamatan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian merupakan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk meyeleksi daerah proyek, perencanaan proyek dan untuk pembinaan di bidang teknis.
- Instansi penyuluhan pada dinas kehutanan, pertanian dan perkebunan, bertanggungjawab untuk pendistribusian proyek dalam kerjasamanya dengan para petani dalam pelaksanaan proyek, pengawasan dan pelaporan prestasi dari kerja proyek ke tingkat dinas yang lebih tinggi.
- Dinas kehutanan, Perkebunan dan Pertanian di tingkat Propinsi, bertanggungjawab untuk menyediakan arahan secara umum, penyiapan dana dan penetapan ahli-ahli dari luar.
- BAPPEDA di tingkat kabupaten dan propinsi bertanggungjawab untuk tindakan legislatif dalam peraturan penggunaan lahan diatas lahan dengan kemiringan yang curam dan erosi tanah.

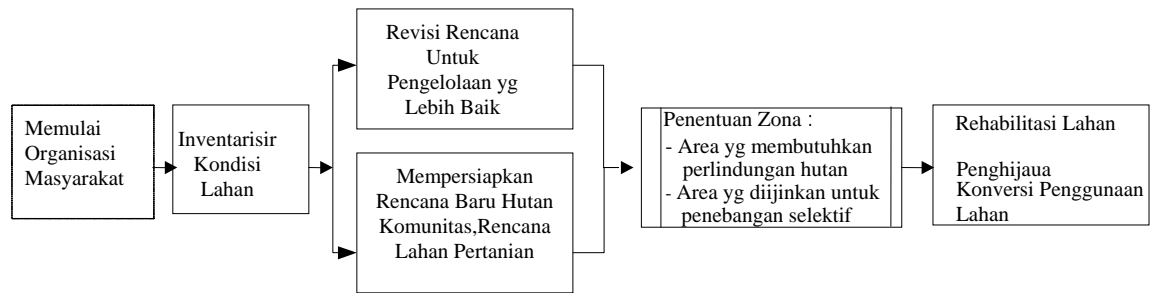
5. Gambaran Program

Program ini terdiri dari aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- Merencanakan dan merancang persiapan lahan
- Persiapan terhadap perawatan, penanaman pohon, dan pelatihan

5. Gambaran Program (Lanjutan)

Langkah-langkah untuk memperkenalkan hutan industri, adalah sebagai berikut:



6. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas		Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V		Tahun VI		Tahun VII			
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Komponen 3 : Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya																	
3 - 1 Penerapan hutan pertanaman pada perkebunan																	
3-1-1	Perumusan proyek																
	- Pembentukan satuan tugas																
	- Pemilihan lokasi																
	- Negosiasi dengan pemimpin																
3-1-2	Perencanaan dan perancangan																
	- Format bagan model proyek																
	- Memulai pengorganisasian																
	- Penginventarisasian kondisi																
	- Peninjauan rencana yang ada untuk pengelolaan yang lebih																
	- Menyiapkan rencana hutan masyarakat, perkebunan rakyat yang																
	- Mendefinisikan pembagian wilayah di dalam																
3-1-3	Pelaksanaan proyek																
	- Pelatihan																
	- Persiapan lahan																
	- Pemeriksaan konstruksi																
	- Pemeliharaan dan persiapan																
	- Penanaman pohon																
	- Pemeliharaan																
3-1-4	Pemantauan dan Pelaporan																
	- Pembangunan bagan pemantauan dan																
	- Pemberlakuan pemantauan dan																
	- Revisi bagan proyek																
	- Berbagi pengalaman proyek pada komunikasi dalam																

7. Biaya Program (30 tempat, 6.000 ha.)

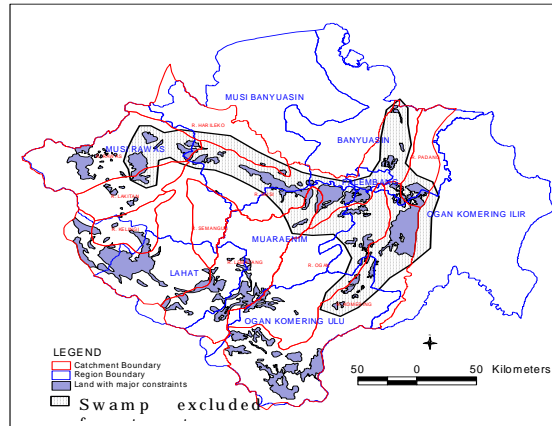
Perencanaan dan Rancangan	Rp. 2.155 juta
Persiapan lahan	Rp.27.240 juta
Persiapan persemaian dan perawatan	Rp. 1.148 juta
Penanaman pohon	Rp.13.067 juta
Pelatihan	Rp. 1.901 juta
Total	Rp.45.511 juta

8. Lain-lain

1. Nama Program: Program 3-3
Memperkuat Penyuluhan Pertanian/Perkebunan/Kehutanan

2. Lokasi

Lokasi kegiatan sama dengan Program 3-1



3. Tujuan

- Menyediakan perhatian dan saran yang lebih baik bagi petani setempat yang selanjutnya untuk mencapai pengelolaan lahan yang lebih baik
- Untuk mengurangi erosi tanah di daerah perkebunan para petani
- Menggalakkan para petani untuk memperkenalkan metode hutan industri untuk digunakan sebagian besar sebagai rumah kebun
- Godaan bagi para petani terhadap penebangan pohon (perkebunan karet dan kopi)
- Pendidikan bagi para petani di bidang teknik untuk konservasi tanah

4. Pihak Pelaksana

- Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten dan kecamatan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian merupakan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menetapkan pembinaan di bidang teknis.
- Dinas kehutanan, Perkebunan dan Pertanian di tingkat propinsi, bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan secara umum, penyiapan dana dan penetapan ahli-ahli dari luar.

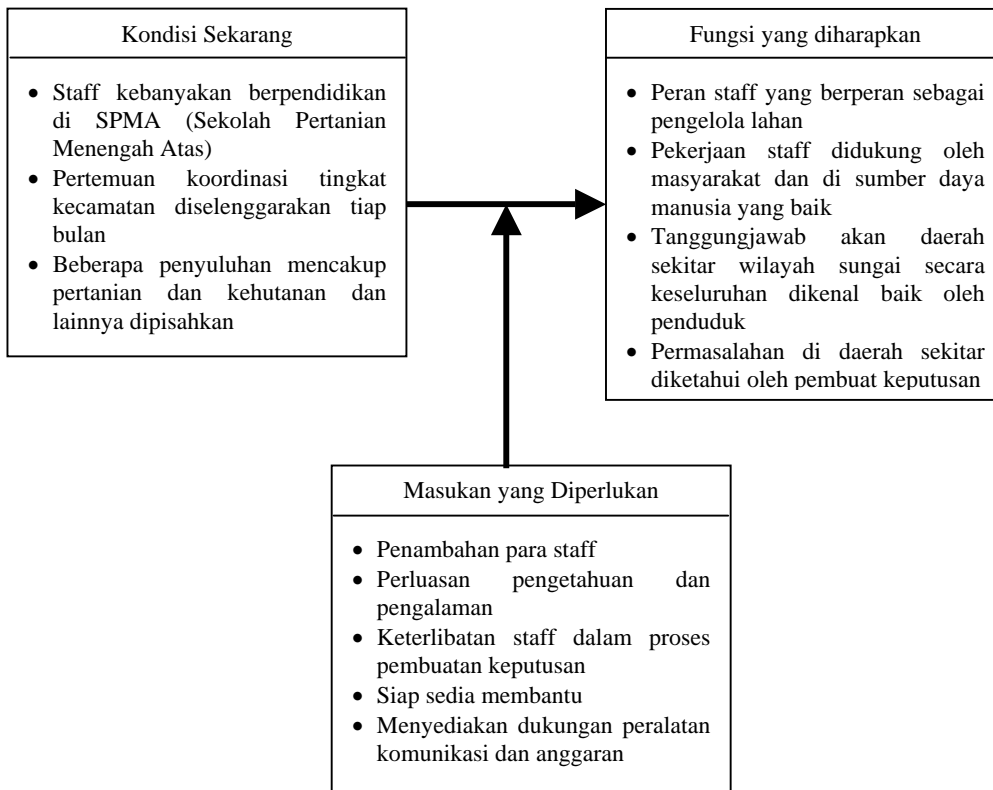
5. Gambaran Program

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Menetapkan pendidikan yang lebih tinggi/pelatihan untuk perluasan bagi para staff yang ada
- Meningkatkan jumlah staf untuk penyuluhan pada lahan utama
- Diperlukan adanya penyuluhan yang lebih mengarah pada pemantauan dan saran
- Memperkenalkan perlengkapan, perawatan dan laboratorium yang penting

5. Gambaran Program (Lanjutan)

Fungsi yang diharapkan dan masukan yang penting untuk perluasan di bidang pertanian dan kehutanan:



6. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas		Tahun I				Tahun II				Tahun III				Tahun IV				Tahun V				Tahun VI				Tahun VII			
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3-3	Memperkuat penyuluhan pertanian/perkebunan/kehutanan																												
3-3-1	Perumusan Proyek																												
	-Bentuk tim kerja	■	■																										
	-Pemilihan lokasi proyek	■	■																										
	-Negosiasi dengan tokoh masyarakat			■	■																								
3-3-2	Pelaksanaan																												

7. Biaya Program

Pelatihan teknis untuk pengelolaan daerah	Rp. 743 juta.
Perbekalan pendidikan yang lebih tinggi	Rp. 2.160 juta.
Penambahan jumlah pegawai	Rp. 2.520 juta
Pembentukan/renovasi perluasan yang baru	Rp. 310 juta
Pengenalan peralatan yang penting	Rp. 930 juta
Total	Rp. 6.663 juta

8. Lain-lain

1. Nama Program:: Program 3-4

Penghijauan Hutan Produksi dan Hutan Tanaman

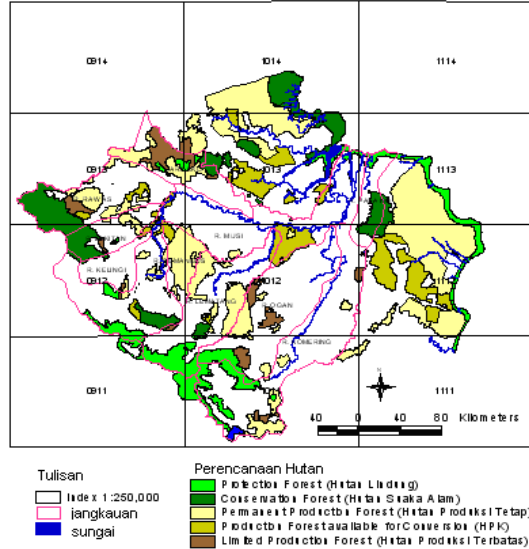
2. Lokasi

Lokasi kegiatan adalah hutan produksi yang telah menerima dana penghutanan kembali di waktu yang lalu.

Peta disamping memperlihatkan semua hutan produksi (Permanen, Konversi dan Produksi yang terbatas) bersamaan dengan hutan lindung dan hutan Suaka Alam.

Prioritas di 21 tempat

HP. Mangsang Mendis, HP Rawas Utara I, HP Rawas Lakitan, HPT Rawas Lakitan, HP Bukit Balai, HPT Bukit Balai, HL Bukit Balai, HPT Gumai Tebing Tinggi, HPT Isau-Isau, HP Air Empelu, HP Bukit Asam, HPT Saka, HPT Meranti S. Kapas S. Saka Suban, HPT. Meranti LB. Buah, HP. Meranti S. Bayat S. Bahar, HP. Meranti S. Merah, HP. Sungai Lalan, HP Simpangheran Beyuku, HP Mesuji III, HPT. Air Tebangka, HP. Saka.



3. Tujuan

- Untuk mengurangi erosi tanah di daerah hutan produksi
- Untuk memastikan bahwa kewajiban penghutanan kembali oleh perusahaan kehutanan telah dipenuhi sesuai yang diharapkan.
- Untuk merehabilitasi sumberdaya hutan yang ada di propinsi untuk penggunaan yang berkelanjutan dimasa yang akan datang.

4. Pihak Pelaksana

- Dinas Kehutanan Propinsi bertanggungjawab untuk mengawasi dana untuk penghutanan kembali dan perusahaan yang menerima dana tersebut, melakukan pembinaan untuk penghutanan kembali yang berdasarkan pada pedoman nasional dan internasional, koordinasi terhadap pengawasan pertumbuhan pohon dengan menggunakan satelit, konsultasi dengan Menteri Kehutanan untuk membentuk perbuatan tindakan hukum yang tegas untuk memantau penggunaan dana penghutanan kembali.
- Polisi hutan bertanggungjawab untuk menegakkan peraturan di bidang kehutanan untuk melawan kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh perusahaan kehutanan.
- Instansi penyuluhan di tingkat kabupaten dan kecamatan bertanggungjawab untuk mengawasi hutan produksi di daerah mereka.

5. Gambaran Program

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Bimbingan dan Komunikasi:

- Bimbingan dari pemerintah propinsi untuk perusahaan perkebunan dan kehutanan.
- Pembentukan tim investigasi yang mencakup anggota dari industri kehutanan, penelitian kehutanan, lingkungan, LSM serta pemerintah setempat maupun pemerintah propinsi

5. Gambaran Program (lanjutan)

Kegiatan Pendorong

- Penghargaan untuk perusahaan yang melakukan kewajiban untuk penghutanan kembali.
- Tambahan dana dari pemerintah propinsi untuk menunjang pekerjaan perawatan bagi penghutanan kembali

Penegakan hukum

- Waktu pembayaran DR ditunda sampai setelah kegiatan penghutanan kembali
- Pelaksanaan yang tidak baik akan dikenakan denda.
- Nama-nama perusahaan yang gagal dalam menjalankan kewajibannya diumumkan di media masa.
- Upah produksi kayu diberikan untuk merefleksikan besarnya pekerjaan penghutanan kembali yang telah dicapai

6. Jadwal Pelaksanaan

jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Program Prioritas		Tahun I				Tahun II				Tahun III				Tahun IV				Tahun V				Tahun VI				Tahun VII			
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3 - 4	Penghijauan hutan produksi dan hutan tanaman																												
3-4-1	Petunjuk dan komunikasi																												
	-Petunjuk untuk perusahaan perhutanan dan perkebunan																												
	-Penyusunan tim investigasi																												
	-Pemantauan kegiatan reboisasi dan keberhasilan																												
3-4-2	Kegiatan penggalakan																												
	-Persiapan perundang-undangan propinsi																												
3-4-3	Kegiatan penegakan hukum																												
	-Persiapan perundang-undangan propinsi																												
	-Konsultasi dengan pemerintah nasional untuk kebijaksanaan yang lebih kuat																												

7. Biaya Program:

Penelitian Hutan Industri
 Untuk 21 tempat sebagai prioritas

Rp. 878 juta

8. Lain-lain

1. Nama Program: Program 3-6
Koordinasi dalam dan antar DAS

2. Lokasi

Subyek tempatnya adalah keseluruhan propinsi Sub-DAS dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok, yaitu:

- 1) Rawas, Lakitan,
- 2) Lematang,
- 3) Musi, Batang Harileko, Semangus, Kelingi,
- 4) Ogan, Komerling.



3. Tujuan

- Untuk merealisasikan pengelolaan sumberdaya air secara menyeluruh di DAS Sungai Musi
- Untuk menggalakkan pemerintah setempat dalam mengelola sumberdaya milik mereka dalam koordinasinya dengan instansi pemerintah lainnya dalam sub-DAS yang sama.

4. Pihak Pelaksana:

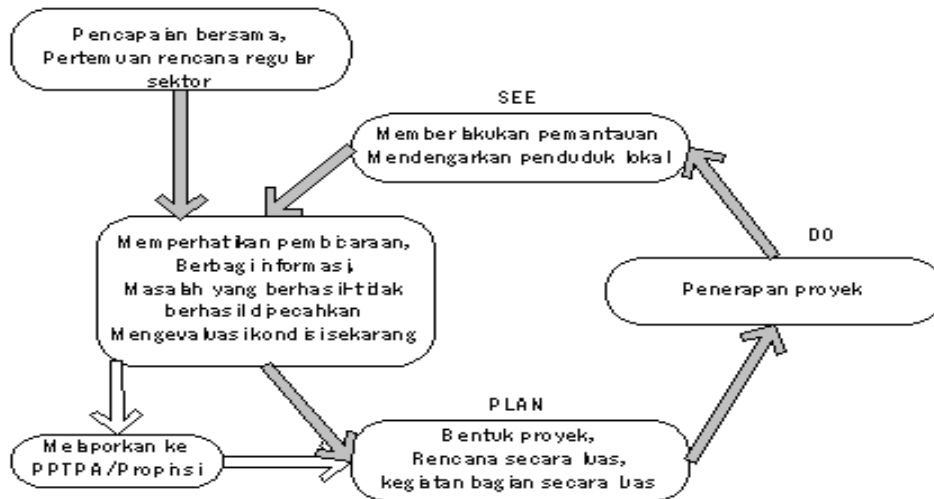
- Kantor Gubernur bertanggungjawab untuk pembentukan PPTPA DAS Sungai Musi, dalam kerjasamanya dengan berbagai dinas dilingkungan propinsi lainnya, pusat penelitian akademi dan LSM
- Tingkat kabupaten bertanggungjawab untuk organisasi ditingkat sub-DAS yang sama dengan PPTPA, yang dibantu oleh pihak propinsi dan PPTPA itu sendiri.

5. Gambaran Program

Masalah-masalah dalam table diharapkan dapat dikoordinasikan antar instansi :



Kegiatan-kegiatan yang diharapkan dalam koordinasi antar instansi:



6. Jadwal Pelaksanaan

Pembentukan sub-DAS atau organisasi ditingkat kabupaten dapat dimulai dengan memprioritaskan PPTPA atau setelahnya, tergantung dari keinginan pihak kabupaten itu sendiri.

7. Biaya Program

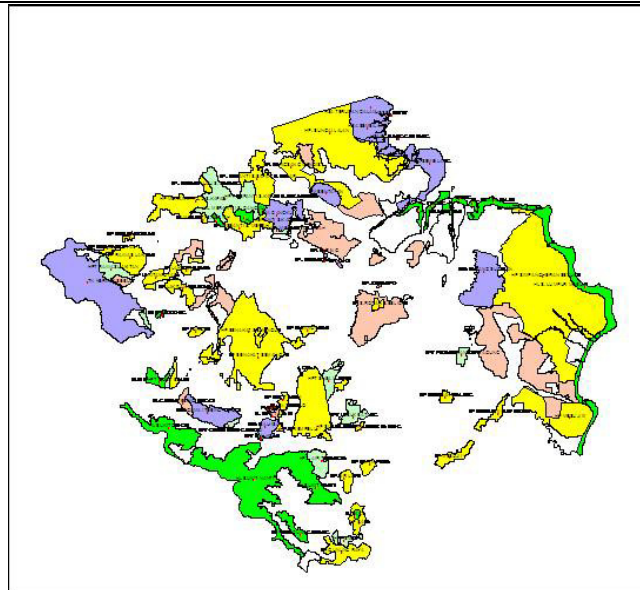
Berdasarkan pada program 6-5-3.

8. Lain-lain

1. Nama Program: Program 3-7
Rehabilitasi Hutan Lindung yang ada

2. Lokasi

Yang menjadi subyek tempat adalah Hutan Suaka Alam dan Hutan Lindung. Prioritas diberikan kepada keenam hutan yang mempunyai pekerja setempat untuk HSA. Padang Sugihan, HSA. Bentayan, HSA. Dangku, HSA. Gumai Pasemah, HSA. Isau-Isau Pasemah, PLG/TWA. Bukit Serelo. HSA. Sungai Sembilang yang diharapkan dapat dialihkan ke Taman Nasional.



3. Tujuan

- Untuk melindungi calon daerah dengan jenis pohon asli ke lokasi tersebut
- Untuk merehabilitasi keanekaragaman mahluk hidup di dalam daerah perlindungan yang ditunjuk

4. Pihak Pelaksana

- Balai KSDA bertanggungjawab terhadap pembangunan program, pembiayaan, pemilihan daerah prioritas, pemanggilan ahli dari luar, pembangunan batas hutan, evaluasi dan pemantauan hasil.
- Perluasan dinas di daerah hutan lindung, bertanggungjawab untuk melaksanakan program, bekerjasama dengan masyarakat setempat, mengawasi kondisi hutan dan habitat, serta memberikan pelatihan terhadap masyarakat setempat sebagai pekerja lapangan.
- Dinas kehutanan propinsi bertanggungjawab untuk persiapan bantuan terhadap perawatan, persediaan bibit dan bibit, kebijakan dalam melawan penebangan liar.

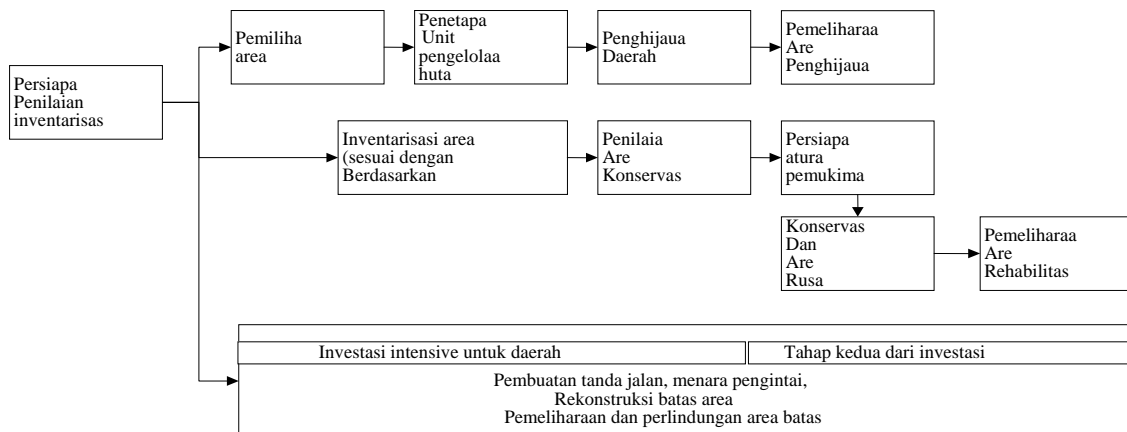
5. Gambaran Program

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:

- Pembangunan Batas Hutan
- Rehabilitasi Hutan (Prioritas diberikan terhadap hutan yang tidak ditutupi oleh pohon vegetasi)
- Rehabilitasi Habitat (Prioritas terhadap hutan dengan sisa pohon vegetasi)
- Penegakan Hukum,
- Pengembangan Sumberdaya Manusia
- Penelitian dan pemantauan

5. Gambaran Program (lanjutan)

Langkah-langkah untuk rehabilitasi daerah hutan lindung baru, adalah sebagai berikut:



Diharapkan DAS Musi dimasukkan ke dalam “Daftar DAS utama untuk Penghijauan (Departemen Kehutanan – Kimpraswil)” dan “DAS untuk Penghijauan dan Rehabilitasi berdasar SK 21 (Departemen Kehutanan)”

6. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan adalah sebagai berikut

Program Prioritas		Tahun I				Tahun II				Tahun III				Tahun IV				Tahun V				Tahun VI				Tahun VII			
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3-7	Rehabilitasi keberadaan hutan lindung																												
3-7-1	Pembangunani batas wilayah hutan																												
	-Pembangunan dari batas area hutan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	-Pemeliharaan dan pengamanan dari batas area hutan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3-7-2	Pemantauan dan penelitian																												
	-Pemilihan area yang diprioritaskan	■	■	■	■																								
	-Pengeinventarisasian dari area yang dilestarikan					■	■	■	■																				
	-Evaluasi pelestarian daerah																												
	-Persiapan petunjuk habitat																												
3-7-3	Pembangunan SDM																												
	-Pengaturan unit pengelolaan hutan																												
	-Reboisasi daerah terbuka																												
	-Pemeliharaan daerah yang direboisasi																												
3-7-4	Reboisasi hutan produksi																												
	-Melakukan patroli, pengamatan menara, gerbang																												
3-7-5	Penegakan hukum																												
	-Rehabilitasi atas kerusakan daerah konservasi																												
	-Pemeliharaan daerah yang telah direhabilitasi																												

7. Biaya Program

Pembangunan Batas Hutan (42 x 30 km)	Rp. 2.232 juta
Penelitian dan pengawasan (6 tempat)	Rp. 227 juta
Pengembangan Sumberdaya Manusia (6 tempat)	Rp. 150 juta
Penghutanan Kembali (6 tempat, 1.200 ha)	Rp. 1.651 juta
Penegakan Hukum (6 tempat)	Rp. 4.810 juta
Rehabilitasi Hutan (200 ha)	Rp. 1.900 juta
Total	Rp. 13.487 juta

8. Lain-lain